



**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAN
Jalan Soka KM 13 Petanahan Telp. (0287) 6655369
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petanahan Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029, serta bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Renja Kecamatan Petanahan disusun sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan di lingkungan kecamatan dalam merumuskan arah kebijakan, prioritas program, serta rencana kegiatan tahunan yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada ketentuan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMN 2025-2029, RPJPN 2025-2045, serta RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Melalui dokumen ini, Kecamatan Petanahan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan. Renja ini juga memuat rencana program dan kegiatan prioritas tahunan, hasil telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, serta kebutuhan anggaran dan capaian kinerja yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dalam aspek sumber daya maupun ketersediaan data. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan dan pelaksanaan dokumen ini ke depan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Petanahan.

Petanahan, 30 Juli 2025
CAMAT PETANAHAN

ARIS YUNANTO, S.IP., M.Si
Pembina Tingkat I-IV/b

NIP : 19690927 198911 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4 Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	46
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	59
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	61
3.3 Program dan Kegiatan	62
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PETANAHAN.....	72
BAB V. PENUTUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi dan Anggaran Tahun 2024	14
Tabel 2.2	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kecamatan Petanahan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Petanahan Kab. Kebumen s.d Tahun 2024.....	19
Tabel 2.4	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen s/d Tahun 2024 Kabupaten Kebumen.....	39
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD TAHUN 2026 Kec. Petanahan	48
Tabel 3.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah	61
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Petanahan.....	62
Tabel 3.3	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	62
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	65
Tabel 3.5	Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Anggaran Tahun 2026.....	67
Tabel 4.1	Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten Kebumen	72
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kab. Kebumen Provinsi Jawa Tengah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petanahan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petanahan Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, serta memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang mengusung arah pembangunan nasional berbasis Asta Cita, yaitu delapan agenda prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan *Indonesia Emas 2045* sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui RPJMD Tahun 2025–2029 menetapkan visi: *"Membangun Kebumen yang Berdaya: Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya"*.

Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Petanahan memiliki peran strategis sebagai simpul penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa di wilayahnya. Kecamatan juga menjadi garda terdepan dalam memastikan implementasi kebijakan pemerintah daerah agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penyusunan Renja Tahun 2026 diarahkan untuk:

1. Menjabarkan sasaran dan program prioritas Kecamatan Petanahan sesuai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kebumen;
2. Menyesuaikan prioritas kegiatan dengan kondisi, potensi, serta kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan;

3. Menyusun rencana kerja yang responsif terhadap isu strategis, terutama peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan desa;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Petanahan Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan tahunan, tetapi juga sebagai pedoman implementatif dalam mencapai visi pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional, melalui pemerintahan yang melayani, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan.

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86 tahun 2017 Renja PD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpatu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Tata cara penyusunan Renja sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja

- 1) Pembentukan Tim Penyusunan Renja PD
- 2) Orientasi mengenai Renja
- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan Renja PD
- 4) Penyiapan Data dan Informasi

- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja pada Minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

- c. Penyusunan Rancangan Renja PD

- 1) Penyusunan Rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD setelah dilakukan review oleh Tim RKPD.
- 2) Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
- 3) Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala Bapperida

untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKP menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapperida. Forum tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD.

- f. Penetapan Renja PD

Keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra-PD terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan.

Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RKPD, Renstra-Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintahan dan masyarakat maupun antara pemerintahan dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen Renja Kecamatan Petanahan tahun 2026 ini merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi/peraturan perundang-undangan yang

berlaku guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petanahan Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029;
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan; dan
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2026 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan Jangka Menengah (lima tahun). Selain itu, penyusunan Renja ini juga dimaksudkan untuk:

1. Menjadi dasar dalam penentuan prioritas kegiatan dan alokasi sumber daya secara efisien, efektif, dan akuntabel;
2. Menjadi acuan bagi koordinasi lintas bidang dan sinergi dengan pemerintah desa, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah Kecamatan Petanahan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Petanahan

Tahun 2026 sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Petanahan Tahun sebelumnya (2024).

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petanahan

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Petanahan
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Petanahan

- 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
- 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Petanahan

Bab V. Penutup

- 5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2024 disusun berdasarkan hambatan, permasalahan yang timbul selama kegiatan berlangsung dan capaian atau keberhasilan yang dicapai dengan penilaian secara objektif. Hasil analisis dari permasalahan, hambatan dan keberhasilan akan diperoleh suatu gambaran tentang program atau kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Masalah adalah sesuatu yang membutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Berdasarkan kondisi tersebut kita bisa mengevaluasi program atau kegiatan kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Petanahan saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang, sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan tentang bagaimana mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Pada tahun 2024, Kecamatan Petanahan mendukung salah satu prioritas pembangunan daerah yakni prioritas pertama “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi”. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pada Tahun 2024 Kecamatan Petanahan menjalankan 4 Program, 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dan anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.777.308.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi keuangan Rp. 3.548.944.523,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) mencapai 93,95% dan

realisasi capaian kinerja fisik mencapai 100 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2024 antara lain :
 - a. Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 2.063.218.000,00 hanya terserap sebesar Rp 1.903.223.615,00 (92,25%). Belanja gaji dan tunjangan ASN tidak bisa terserap secara optimal dikarenakan adanya jabatan yang belum terisi, yaitu Kasi Kesos.
 - b. Belanja Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 19.631.000,00 hanya terserap Rp. 18.035.143,00 (91,87%). Belanja ini tidak terserap optimal karena ada biaya BBM yang tidak terealisasi.
 - c. Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapangan sebesar Rp. 57.481.000,00, terealisasi sebesar 50.725.695,00 (88,25%). Kegiatan ini terserap tidak maksimal karena ada efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
 - d. Belanja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan sebesar Rp. 76.425.000,00 hanya terserap Rp. 62.886.800,00 (82,29%). Pada kegiatan ini tidak bisa terserap maksimal karena realisasi BBM belum maksimal.
 - e. Belanja Kegiatan Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebesar Rp.1.855.000,00 tidak ada realisasi dikarenakan tidak ada kegiatan tersebut.
 - f. Penyerapan pada sub kegiatan lain sudah terserap dengan baik meskipun belum maksimal. Beberapa belanja hanya dapat diprediksikan besaran kebutuhannya seperti listrik dan telepon.

2. Capaian Keuangan

Realisasi Anggaran Tahun 2024, Kecamatan Petanahan disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Realisasi dan Anggaran Tahun 2024

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.865.000	6.735.900	98,12%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.204.000	4.203.000	99,98%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.063.218.000	1.903.223.615	92,25%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.631.000	18.035.143	91,87%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	926.000	923.000	99,68 %
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.835.000	11.783.000	99,56%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.560.000	6.246.600	95,22 %
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.995.000	99,75%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.673.000	10.241.500	95,96 %
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.152.000	22.142.750	99.96 %
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.125.000	1.125.000	100.%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	330.000	330.000	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000	23.968.491	95,11%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Capaian (%)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.122.000	28.109.000	99,95%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	8.696.000	8.500.000	97,75 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	14.225.000	14.210.000	99,98%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.481.000	50.725.965	88,25%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	1.525.000	1.525.000	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	3.500.000	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	7.354.000	7.292.000	99,16%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	76.425.000	62.886.800	82,29%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	1.266.387.000	1.229.441.079	97,08%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	22.147.000	22.058.700	99,60%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Capaian (%)
Pelaksanaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia			
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			
Sub Kegiatan Fasilitasi, Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36.289.000	34.811.300	95,93%
Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.855.000	0	0,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	6.640.000	6.629.100	99,84%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentramaan dan Ketertiban Umum	17.645.000	16.917.100	95,87%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.085.000	20.279.000	96,18%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.958.000	23.854.750	91,90%
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.755.000	10.751.500	99,97%
Jumlah	3.777.308.000	3.548.944.523	93,95%

Berdasarkan tabel – tabel diatas:

1. Pagu Anggaran secara keseluruhan Rp 3.777.308.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) bisa terealisasi sebesar Rp 3.777.308.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) atau 93,94% yang berarti sisa lebih anggaran (silpa) Rp. 228.363.477,00 (Dua ratus

dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

2. Kegiatan – kegiatan fisik yang telah direncanakan rata - rata anggaran bisa terserap antara 92 % (Sembilan puluh dua persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dengan serapan anggaran secara keseluruhan mencapai 93,95% dengan realisasi fisik rata rata bisa tercapai 100%.
3. Serapan anggaran terendah dicapai oleh sub kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kegiatan ini tidak terealisasi karena di Desa belum mengadakan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa)

4. Keberhasilan

- a. Realisasi belanja tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 52,84%. Hal ini karena adanya kenaikan pagu anggaran.
- b. Realisasi belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp. 3.539.624.523,00 mencapai 93,94% dari anggaran sebesar Rp 3.767.792.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi 2023 yang sebesar Rp 2.309.576.373,00 (96,97%) secara presentase capaian mengalami penurunan, tetapi dengan adanya kenaikan anggaran yang lebih besar dari selisih penurunan, maka capaian sudah meningkat. Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
- c. Realisasi belanja modal sebesar Rp 9.320.000,00 mencapai 97,94 % dari anggaran sebesar Rp 9.516.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi 2023 yang sebesar Rp 12.384.500,00.
- d. Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan dengan indikator sasaran Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan memiliki target 90,38 sedangkan realisasi 91,00 dan persentase capaian kinerja tahun 2023 dengan hasil 88,36 masuk dalam kategori capaian Baik Sekali (BS). Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,38	91,00	100,68%
	Sasaran				
1	Meningkatkannya Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	90,38	91,00	100,68%

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kecamatan Petanahan 2021-2026 sampai Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Petanahan dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen s/d Tahun 2024**

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Petanahan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75	66,95	66,95	66,95	100%	68,78	68,78	92%
Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66	11	11	11	100%	11	11	17%
		36	6	6	6	100%	6	6	17%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	5	5	5	100%	5	5	17%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	12	12	100%	12	12	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	20	20	100%	20	20	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.	72	12	12	12	100%	12	12	17%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	12	12	100%	12	12	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor yang disediakan	4	4	4	4	100%	4	4	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.	12	12	12	12	100%	12	12	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD.	12	12	12	12	100%	12	12	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	12	12	12	12	100%	12	12	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	42	5	5	5	100%	12	12	29%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	10	0	0	0	100%	2	2	20%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16	3	3	3	100%	8	8	50%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Pembangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	14	2	2	2	100%	2	2	14%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	12	12	12	12	100%	12	12	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	72	12	12	12	100%	12	12	17%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72	12	12	12	100%	12	12	17%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	72	12	12	12	100%	12	12	17%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82	6	6	6	100%	6	6	7%
		36	6	6	6	100%	6	6	17%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya.								
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	8	4	4	4	100%	4	4	50%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23	8	8	8	100%	8	8	35%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	12	3	3	3	100%	2	2	17%
Kewilayahan									

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Kecamatan									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Prosentase cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan:									
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peririzan.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada urusan Pemerintahan	18	9	9	9	100%	9	9	5000%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	0	0	0	0	100%	0	0	0%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10000%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI, Kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi Karnaval, Resepsi HUT RI.	330	55	55	55	100%	55	55	17%
--	--	-----	----	----	----	------	----	----	-----

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100%	100	100	100%
Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	35	35	35	100%	35	35	35%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan Aset desa	58	21	21	21	100%	21	21	36%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.	4	2	2	2	100%	2	2	50%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	12	2	2	2	100%	2	2	17%
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelengga raan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6	2	2	2	100%	2	2	33%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Musrenbangdes dan Musrenbang Cam)	18	2	2	2	100%	2	2	11%
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemberdaya an Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	24	4	4	4	100	4	4	17%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (Tahun berjalan)	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=9	11=(10/4)
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya. (Penanggulangan Kemiskinan (TKP2KDes dan Bansos Sembako)	12	2	2	2	100%	2	2	17%

Secara umum program bisa dilaksanakan semua dengan realisasi keuangan mencapai 93,95% dan untuk kegiatan fisik tercapai 100%, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota jumlah anggaran RP. 2.292.122.000 dengan realisasi Rp. 2.121.315.194 (92,55%) dengan silpa 170.806.806 (7,45%) dimana silpa terbesar adalah dari Gaji;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan jumlah anggaran Rp. 1.342.812.000 dan realisasi Rp. 1.292.327.879 (96,24%) dengan silpa Rp. 50.484.121 (3,76%)
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala daerah jumlah anggaran Rp. 22.147.000 dan realisasi Rp. 22.058.700 (99,60 %) dengan silpa Rp. 88.300 (0,40 %)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa untuk Program Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa jumlah anggaran Rp. 120.227.000 dan realisasi Rp. 113.242.750 (94,19%) dengan silpa Rp. 6.984.250 (3,81 %):

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Petanahan selama tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari tingkat realisasi keuangan sebesar 93,95% serta realisasi kegiatan fisik mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan telah terlaksana, meskipun terdapat beberapa penyebab tidak terserapnya anggaran secara penuh atau munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 228.363.477,00 (6,05%).

Kinerja pelaksanaan program yang relatif tinggi tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Petanahan dalam mendukung sasaran Renstra. Namun demikian, beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran menimbulkan sejumlah implikasi, antara lain:

1. Efisiensi pada belanja pegawai dan operasional mengindikasikan adanya posisi jabatan yang belum terisi (misalnya Kasi Kesos), yang dapat berdampak pada beban kerja pegawai dan berpotensi mempengaruhi kesinambungan layanan publik tertentu;
2. Efisiensi pada kegiatan operasional dan pemeliharaan (seperti biaya BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas) menunjukkan adanya

upaya penghematan anggaran, namun juga menandakan perlunya penyesuaian dalam perencanaan kebutuhan operasional di tahun berikutnya;

3. Belanja kegiatan nonperizinan dan pembinaan desa yang belum terserap maksimal berimplikasi pada perlunya peningkatan koordinasi antarbidang dan antarinstitusi, agar program yang bersifat lintas sektor dapat terealisasi sesuai jadwal;
4. Kegiatan rekomendasi perangkat desa yang tidak terealisasi menunjukkan adanya faktor eksternal (seperti tidak adanya usulan atau kebutuhan mutasi perangkat desa) yang mempengaruhi capaian output kegiatan.
5. Meskipun indikator kinerja program tercapai secara fisik 100%, namun tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran perlu terus dievaluasi agar tidak menimbulkan deviasi antara target keuangan dan output kinerja.

Untuk mengatasi faktor penyebab serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di tahun-tahun mendatang, Kecamatan Petanahan perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Optimalisasi Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Jabatan Fungsional.

Dilakukan pemetaan kebutuhan SDM sesuai beban kerja dan fungsi pelayanan, serta percepatan pengisian jabatan yang kosong agar tidak menimbulkan SiLPA pada belanja pegawai.

2. Penyempurnaan Perencanaan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu lebih berbasis kebutuhan riil, termasuk memperhitungkan variabel efisiensi penggunaan bahan bakar, listrik, dan jasa komunikasi agar lebih realistis namun tetap mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan.

3. Peningkatan Akurasi dalam Penjadwalan dan Pelaksanaan Kegiatan.

Diperlukan sinkronisasi antara perencanaan kegiatan dengan jadwal pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan di lapangan, agar tidak terjadi penundaan realisasi akibat kendala administratif atau teknis.

4. Penguatan Koordinasi Antarbidang dan Antarinstansi. Untuk kegiatan yang melibatkan perangkat desa dan instansi lain, perlu dilakukan perencanaan terpadu serta pendampingan teknis agar seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai target.
5. Penguatan Fungsi Monitoring dan Evaluasi (Monev). Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian fisik dan keuangan di setiap triwulan, serta menindaklanjuti hasil evaluasi dengan penyesuaian rencana kegiatan jika terdapat hambatan di lapangan.
6. Kebijakan Efisiensi Tanpa Mengurangi Kualitas Layanan Publik. Efisiensi pada belanja rutin perlu tetap mempertahankan standar pelayanan minimal, khususnya dalam bidang pelayanan PATEN, administrasi kependudukan, dan fasilitasi pemerintahan desa.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Petanahan

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat sehingga dari pengertian tersebut, kedudukan kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa

- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat, Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Petanahan, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Petanahan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
- 2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
- 3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Petanahan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Petanahan
Kabupaten Kebumen s/d Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Petanahan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023(th n n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-		88,36	90,38	91,40	92,42	93,69	92,73	94,33	95,00	-

Tabel di atas menunjukkan capaian Renstra PD berdasarkan survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Petanahan. Realisasi telah melebihi nilai yang ditargetkan, yaitu target 88,36 pada tahun 2023 dengan capaian 93,69, serta target 90,38 pada tahun 2024 dengan capaian 92,73. Selanjutnya diproyeksikan untuk tahun 2025 sebesar 94,33 dan tahun 2026 sebesar 95,00. Penilaian untuk tahun 2025 masih berjalan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat diwilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Kebumen, hal ini diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 137/434 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Tingkat Kinerja pelayanan Kecamatan Petanahan sampai dengan Tahun 2025 Triwulan II telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Namun, masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Petanahan sehingga menimbulkan dampak baik bagi instansi maupun masyarakat. Permasalahan dan dampaknya, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan sebagai penunjang pelayanan, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan. Contohnya kurangnya ketersediaan AC pada pelayanan PATEN dapat berpengaruh pada kenyamanan masyarakat saat mendapat pelayanan;
2. Belum semua pegawai mendapatkan diklat teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga beberapa tugas dan fungsi berjalan kurang optimal;

3. Masih perlu peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa sehingga masih ada kendala dalam penyelesaian APBDes sesuai dengan jadwal;
4. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Petanahan tahun 2025: Desa Maju 2 (dua) Desa, dan Desa Mandiri 19 (Sembilan belas) Desa. Desa IDM tahun 2025 lebih meningkat dari tahun 2024. Untuk kedepan harapannya Desa IDM sudah terealisasi menjadi Desa Mandiri semua di 21 (dua puluh satu) Desa.
5. Tanggapan yang masih rendah terhadap program-program yang disampaikan sehingga sering mendapatkan tagihan laporan dari instansi terkait karena laporan yang terlambat
6. Pelayanan Publik khususnya untuk KTP masih terkendala karena kurangnya pegawai pelayanan yang mampu mengoperasikan peralatan. Ketika pegawai tersebut menjalankan tugas lain, maka pelayanan menjadi terhambat.
7. Beberapa kali terjadi kendala jaringan dalam proses pelayanan Paten.
8. Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi anggaran sampai level belanja, sehingga sulit mengidentifikasi apa saja pos pos yang belum terealisasi maksimal.

Adanya permasalahan dan hambatan, serta dampak yang dihadapi Kecamatan Petanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mengganggu kinerja pelayanan Kecamatan Petanahan jika tidak mendapatkan penyelesaian yang tepat yang pada akhirnya dapat mengurangi kontribusi Kecamatan Petanahan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Petanahan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serta sekaligus membuka peluang perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang pelayanan masyarakat. Kondisi fisik dan fasilitas yang terbatas, seperti kurangnya pendingin ruangan (AC) pada ruang pelayanan PATEN, berpengaruh terhadap kenyamanan

masyarakat dan kinerja pegawai. Namun demikian, hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengadaan dan modernisasi fasilitas kantor, yang sekaligus dapat meningkatkan citra pelayanan publik di Kecamatan Petanahan., Tantangan berikutnya adalah belum meratanya peningkatan kompetensi pegawai, terutama dalam hal pelatihan teknis sesuai bidang tugas. Masih ada pegawai yang belum mendapatkan diklat teknis sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi belum berjalan maksimal. Kondisi ini membuka peluang pengembangan sumber daya aparatur melalui peningkatan kapasitas, baik melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, maupun kolaborasi antarperangkat daerah untuk memperkuat profesionalisme ASN di tingkat kecamatan.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia perangkat desa masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa agar penyelesaian APBDes dapat tepat waktu. Meskipun demikian, hal ini menjadi peluang bagi Kecamatan Petanahan untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pendampingan terhadap desa, sehingga tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dari sisi pembangunan desa, Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Petanahan tahun 2025 menunjukkan tren yang positif, dengan capaian 19 Desa Mandiri dan 2 Desa Maju. Peningkatan ini menjadi peluang besar untuk mendorong seluruh desa menuju status Desa Mandiri, melalui penguatan kolaborasi antar instansi, optimalisasi potensi lokal, serta dukungan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa.

Tantangan lainnya adalah rendahnya tanggapan dan ketepatan waktu pelaporan terhadap program-program yang disampaikan, yang berimplikasi pada keterlambatan penyampaian laporan kepada instansi terkait. Kondisi ini sekaligus menjadi peluang untuk memperbaiki sistem komunikasi dan pelaporan, baik melalui digitalisasi proses pelaporan maupun peningkatan kesadaran tanggung jawab aparatur terhadap ketepatan waktu pelaporan kinerja.

Dari sisi pelayanan publik, masih terdapat kendala seperti terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis mengoperasikan peralatan pelayanan KTP, serta kendala jaringan dalam pelayanan PATEN. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga

kontinuitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang untuk memperkuat kompetensi teknis pegawai, melakukan pelatihan lintas fungsi, serta memperbaiki infrastruktur jaringan dan teknologi informasi agar pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan responsif.

Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran hingga level belanja. Hal ini menyulitkan dalam mengidentifikasi pos-pos anggaran yang belum terealisasi secara maksimal. Situasi ini justru menjadi peluang untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data serta aplikasi digital, yang dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan Petanahan.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan yang dihadapi Kecamatan Petanahan bukan hanya menunjukkan adanya keterbatasan, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi antarinstansi, dan modernisasi tata kelola pemerintahan. Dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut secara optimal, Kecamatan Petanahan dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih profesional, akuntabel, dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Formulasi Isu-Isu Penting, Rekomendasi, dan Catatan Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi internal dan capaian kinerja Kecamatan Petanahan, terdapat beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan. Isu-isu ini merupakan permasalahan yang strategis, karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan kepada desa.

1. Isu 1: Belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang pelayanan masyarakat.
 - Rekomendasi Strategis: Diperlukan peningkatan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana kantor kecamatan, terutama ruang pelayanan publik (PATEN), melalui kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Catatan: Penguatan fasilitas fisik, seperti pendingin ruangan (AC), ruang tunggu yang representatif, dan peralatan layanan digital, akan meningkatkan kenyamanan masyarakat serta mendukung profesionalisme pelayanan.
2. Isu 2: Belum semua pegawai memperoleh diklat teknis sesuai bidang tugas dan peraturan yang berlaku.
- Rekomendasi Strategis: Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi.
 - Program Terkait: *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* – kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Catatan: Peningkatan kapasitas ASN secara berkelanjutan akan memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan publik dan memperbaiki kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja kecamatan.
3. Isu 3: Masih perlu peningkatan kapasitas SDM perangkat desa, terutama dalam penyusunan dan pelaporan APBDes tepat waktu.
- Rekomendasi Strategis: Melaksanakan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan fokus pada peningkatan kemampuan administrasi dan keuangan desa.
 - Catatan: Penguatan kapasitas perangkat desa akan berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mempercepat terwujudnya desa mandiri.
4. Isu 4: Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang meningkat, namun belum seluruh desa mencapai kategori mandiri.
- Rekomendasi Strategis: Kecamatan perlu berkolaborasi dengan OPD terkait dan pemerintah desa untuk mempercepat peningkatan status desa menjadi mandiri.
 - Program Terkait: *Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*.
 - Catatan: Keberhasilan peningkatan IDM akan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, sekaligus memperkuat

kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Petanahan.

5. Isu 5: Masih rendahnya ketepatan waktu pelaporan terhadap program yang dilaksanakan, sehingga sering terlambat dalam penyampaian laporan ke instansi terkait.
 - Rekomendasi Strategis: Diperlukan perbaikan sistem administrasi pelaporan berbasis digital serta penegasan mekanisme koordinasi internal antar-seksi.
 - Program Terkait: *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* – kegiatan Administrasi Umum dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Catatan: Penerapan disiplin pelaporan dan penggunaan sistem informasi kinerja (*e-Sakip*) akan mempercepat proses evaluasi dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
6. Isu 6: Pelayanan publik, khususnya perekaman dan penerbitan KTP, masih terkendala keterbatasan pegawai yang menguasai peralatan dan sistem pelayanan.
 - Rekomendasi Strategis: Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas teknis pegawai pelayanan melalui pelatihan operasional peralatan administrasi kependudukan, serta penataan ulang pembagian tugas agar pelayanan tidak terhenti saat pegawai tertentu berhalangan.
 - Program Terkait: *Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik* – kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan.
 - Catatan: Penguatan SDM pelayanan publik akan meningkatkan kecepatan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
7. Isu 7: Kendala jaringan dalam proses pelayanan PATEN yang berdampak pada keterlambatan pelayanan.
 - Rekomendasi Strategis: Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk perbaikan dan pemeliharaan jaringan internet secara berkala, serta menyiapkan alternatif jaringan cadangan.

- Program Terkait: *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* – kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Catatan: Keandalan sistem jaringan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan PATEN berbasis teknologi informasi.
8. Isu 8: Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi anggaran hingga level belanja, sehingga belum tergambarkan secara utuh realisasi kinerja keuangan.
- Rekomendasi Strategis: Perlu penguatan fungsi monitoring dan evaluasi keuangan melalui kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, serta peningkatan kompetensi staf dalam analisis realisasi anggaran.
 - Catatan: Penerapan sistem pengawasan dan evaluasi anggaran yang lebih rinci akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

2.4. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2026 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bentuk rasionalisasi anggaran. Beberapa anggaran pada program dan kegiatan mengalami kenaikan dan penurunan.
- b. Alokasi anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Petanahan,
- c. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan di Kecamatan Petanahan, seperti fokus efisiensi belanja operasional dengan tetap mempertahankan capaian kinerja program dan kegiatan, serta rasionalisasi kegiatan nonprioritas agar sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya.
- d. Penyesuaian kebutuhan riil belanja operasional, termasuk kebutuhan gaji dan tunjangan ASN, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik di wilayah Kecamatan Petanahan.

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD TAHUN 2026
Kecamatan Petanahan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Petanahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai).	70,03	2.495.055.540	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Petanahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70.03	2.598.998.065	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	6.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	9.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.000.000	Penyusunan Laporan Kegiatan	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.340.810.908	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.350.463.100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Petanahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.330.810.908	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Petanahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.339.463.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	36.510.000	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	44.600.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	10.850.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	13.500.000	
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Petanahan	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Petanahan	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	7.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	2.500.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 Paket	12.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 Paket	13.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.960.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kecamatan Petanahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.200.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.600.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	37.718.632	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	8 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	2 Unit	7.718.632	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	8 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	3 Unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	30.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	85.004.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	200.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	27.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	4.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	57.504.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	44.016.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	59.930.965	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Petanahan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	36.516.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Petanahan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	40.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kec. Petanahan	Jumlah Mebel yang dipelihara	2 Unit	1.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Petanahan	Jumlah Mebel yang dipelihara	2 Unit	1.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Peralatan dan Mesin	8 Unit	2.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Peralatan dan Mesin	8 Unit	2.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Lainnya yang dipelihara					Lainnya yang dipelihara			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	2 Unit	4.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	15.930.965	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Petanahan	Prosentase cakupan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	29.230.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Petanahan	Prosentase cakupan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	11.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Petanahan	Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	29.230.000	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Petanahan	Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	11.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	9 Laporan	29.230.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	9 Laporan	11.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21 Laporan	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	0	
3	Program Penyelenggaraan Urusan	Kec. Petanahan	Cakupan terselenggaranya urusan	100 %	19.495.000	Program Penyelenggaraan Urusan	Kec. Petanahan	Cakupan terselenggaranya urusan	100 %	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemerintahan Umum		pemerintahan umum			Pemerintahan Umum		pemerintahan umum			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	19.495.000	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Petanahan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 Kegiatan	20.000.000	
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Petanahan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Orang	19.495.000	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Petanahan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	55 Orang	20.000.000	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petanahan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan	100 %	112.152.000	Program Pembinaan dan Pengawasan	Kec. Petanahan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan	100 %	100.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pemerintahan Desa			Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	112.152.000	Kegiatan: Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petanahan	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	9 Dokumen	100.500.000	
	Fasilitasi Pengelolaan k Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	20.230.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Petanahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	9 Dokumen	29.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19 Dokumen	2.500.000	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Kec. Petanahan	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.	Kec. Petanahan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	9.400.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.	Kec. Petanahan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	2 Dokumen	14.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan	2 Dokumen	11.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan	1 Dokumen	9.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	22.450.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	20.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	38.450.000	Fasilitasi Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	8.122.000	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	6.500.000	
	JUMLAH				2.655.932.540					2.730.498.065	

Berdasarkan tabel di atas, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Petanahan, terjadi beberapa penyesuaian. Secara umum, total anggaran mengalami kenaikan dari Rp 2.655.932.540 menjadi Rp 2.730.498.065 atau meningkat sebesar Rp 74.565.525 (2,8%). Perubahan anggaran Kecamatan Petanahan Tahun 2026 bersifat penyesuaian kebutuhan dan optimalisasi belanja, bukan penambahan program baru. Berikut review dari beberapa program/kegiatan yang mengalami perubahan.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mengalami peningkatan pagu anggaran dari Rp 2.495.055.540 menjadi Rp 2.598.998.065 atau naik Rp 103.942.525 (4,17%).

Peningkatan anggaran terutama disebabkan oleh:

1. Penyesuaian kebutuhan belanja pegawai (gaji dan tunjangan ASN) karena adanya tambahan pegawai (dari 17 menjadi 20 orang per bulan);
2. Koreksi kebutuhan operasional kantor, seperti listrik, bahan logistik, jasa komunikasi, serta pemeliharaan sarana kantor;
3. Penambahan jumlah unit dan paket pengadaan barang milik daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja aparatur kecamatan;
4. Kenaikan pada kegiatan administrasi umum dan penunjang urusan pemerintahan daerah, menyesuaikan kebutuhan riil penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pemerintahan.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini mengalami penurunan anggaran signifikan dari Rp 29.230.000 menjadi Rp 11.000.000 atau berkurang Rp 18.230.000 (62,4%).

Penurunan ini terjadi karena beberapa pertimbangan, diantaranya:

1. Efisiensi dalam pelaksanaan urusan nonperizinan dan kewenangan yang dilimpahkan, dengan asumsi beberapa kegiatan dapat digabung atau dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pemerintahan umum;
2. Rasionalisasi belanja operasional untuk menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini mengalami sedikit peningkatan pagu dari Rp 19.495.000 menjadi Rp 20.000.000 atau naik Rp 505.000 (2,6%). Kenaikan ini diarahkan untuk:

1. Mendukung kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, khususnya kegiatan peringatan HUT RI dan kegiatan kebangsaan lainnya;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan unsur kelembagaan lokal dalam kegiatan kenegaraan yang menjadi kewenangan camat.

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini mengalami penurunan anggaran dari Rp 112.152.000 menjadi Rp 100.500.000, atau berkurang Rp 11.652.000 (10,39%). Penyesuaian ini dilakukan untuk:

1. Menyesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan fasilitasi pemerintahan desa, khususnya kegiatan pembinaan, koordinasi, dan pendampingan;
2. Rasionalisasi jumlah dokumen dan kegiatan fasilitasi, dari 13 dokumen menjadi 9 dokumen, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;
3. Peningkatan fokus pada kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil desa).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama Kecamatan Petanahan merupakan hasil dari proses perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, serta para pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Petanahan. Usulan-usulan program dan kegiatan tersebut dihimpun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat guna dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan.

Proses penjarangan aspirasi dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan di seluruh desa di wilayah Kecamatan Petanahan. Pada tahap ini, masyarakat bersama pemerintah desa mengidentifikasi potensi, permasalahan, serta kebutuhan prioritas di berbagai bidang, seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan

pelayanan publik. Hasil musyawarah desa tersebut kemudian dituangkan dalam Daftar Usulan Desa (DU-Desa) sebagai bahan masukan bagi perencanaan di tingkat kecamatan.

Selanjutnya, seluruh hasil Musrenbangdes dibahas dan disinergikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2026. Dalam forum Musrenbangcam ini, pemerintah kecamatan berperan sebagai fasilitator dan mediator yang menjembatani antara kepentingan masyarakat, perangkat desa, dan perangkat daerah kabupaten agar tercipta keselarasan antara kebutuhan di lapangan dengan prioritas pembangunan daerah.

Melalui Musrenbangcam tersebut, Kecamatan Petanahan bersama pemerintah desa dan para pemangku kepentingan menyusun Daftar Prioritas Usulan Kecamatan (DPUK), yang merupakan hasil kompromi antara urgensi kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. DPUK ini menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Petanahan dalam Renja Tahun 2026, baik yang dibiayai melalui anggaran kecamatan maupun diusulkan kepada perangkat daerah teknis di tingkat kabupaten.

Selanjutnya, Daftar Prioritas Usulan Kecamatan tersebut dibahas lebih lanjut dalam Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, guna dilakukan verifikasi, sinkronisasi, serta penyesuaian dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah. Melalui proses ini diharapkan terwujud keselarasan antara aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen, sehingga setiap program dan kegiatan yang diusulkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Daftar Prioritas Usulan Kecamatan Petanahan Tahun 2026 yang telah disepakati bersama hasil forum Musrenbangcam disajikan secara lengkap dalam Lampiran Dokumen Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2026 sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petanahan Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi sebagai upaya menjaga konsistensi antara perencanaan di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Telaahan terhadap kebijakan tersebut dimaksudkan agar program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan yang lebih tinggi serta mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Kebumen.

1. Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Tema RKP Tahun 2026 diarahkan pada *"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"*. Beberapa prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2026:

- 1) Penguatan SDM dan daya saing daerah: Melalui program seperti digitalisasi pendidikan dan Sekolah Rakyat.
- 2) Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik: Menekankan perubahan cara kerja baru yang lebih sinergis, efektif, dan terfokus pada hasil, seperti yang diutarakan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
- 3) Ketahanan pangan, energi, dan lingkungan: Meliputi program unggulan seperti Program Makan Bergizi Gratis dan pengelolaan sampah terpadu, serta optimalisasi lumbung pangan (food estate).
- 4) Pertumbuhan ekonomi hijau dan inklusif: Melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing ekonomi.
- 5) Pengembangan wilayah dan pengurangan kesenjangan: Termasuk pembangunan 3 juta unit rumah dan Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu.

Kebijakan nasional tersebut menjadi acuan utama dalam penyusunan program Kecamatan Petanahan, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar, optimalisasi peran kecamatan

sebagai koordinator wilayah, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.

2. Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, dengan visi tahun 2026 yaitu *“Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah yang Maju, Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”*.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 mencakup:

- 1) Transformasi Ekonomi: Fokus pada pengembangan ekonomi daerah agar lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.
- 2) Transformasi Sosial: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menekankan pada SDM yang unggul dan berkarakter, yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 3) Transformasi Tata Kelola: Reformasi birokrasi agar pemerintahan lebih berintegritas dan dinamis, serta meningkatkan kondusivitas wilayah dan demokrasi.

Kecamatan Petanahan sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah berperan penting dalam mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan provinsi, terutama dalam hal fasilitasi pemerintahan desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayahnya.

3. Keterkaitan dengan Kebijakan Kabupaten Kebumen

Berdasarkan arah kebijakan nasional dan provinsi tersebut, maka kebijakan dan prioritas pembangunan Kecamatan Petanahan Tahun 2026 diarahkan untuk:

- 1) Mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029;
- 2) Memperkuat peran kecamatan sebagai simpul koordinasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang efisien dan berbasis data digital;

- 4) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan kesejahteraan berbasis potensi lokal.

Dengan demikian, kebijakan nasional dan provinsi menjadi landasan strategis bagi Kecamatan Petanahan dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas pada Renja Tahun 2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Kecamatan Petanahan selaras dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Petanahan tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran Daerah	Tujuan/Sasaran Kecamatan	Indikator Tujuan/Sasaran Kecamatan
Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya	1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Iklusif	Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan		
	2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
	3. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Petanahan	Indeks Tata Kelola Kecamatan
	4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi			
	5. Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Guyub, dan Rukun Atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal			

Tujuan dan sasaran Kecamatan Petanahan di jabarkan dalam tabel berikut ini

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun 2026
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Petanahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	90,40
Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Petanahan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Petanahan	82,00

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor Pertimbangan

Progam dan kegiatan di Kecamatan Petanahan disusun berdasarkan analisis faktor-faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan. Berikut adalah tabel analisis tersebut;

Tabel 3.3

Analisis Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Petanahan Tahun 2026

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan	Arah Kebijakan / Rencana Tindakan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyesuaian dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Memperkuat tata kelola administrasi, keuangan, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
		Kebutuhan peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.	Melanjutkan pengadaan dan pemeliharaan sarana kantor (listrik, mebel, gedung).
		Ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan publik yang masih terbatas.	Mengoptimalkan penggunaan anggaran berbasis efisiensi dan hasil kinerja.

		Perlunya efisiensi operasional dan optimalisasi penggunaan anggaran.	
	Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan ketepatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Tuntutan peningkatan nilai SAKIP Kecamatan Petanahan.	Penguatan fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi anggaran belum maksimal akibat efisiensi dan jabatan belum terisi. Perlunya peningkatan kompetensi bendahara dan verifikator keuangan.	Pelatihan penatausahaan dan pelaporan keuangan. Optimalisasi sistem administrasi keuangan berbasis elektronik.
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kondisi sarana dan fasilitas kerja perlu pemeliharaan rutin. Pentingnya dukungan logistik, komunikasi, dan arsip untuk kelancaran pelayanan.	Melanjutkan pemeliharaan aset dan penyediaan logistik kantor. Digitalisasi arsip dan layanan surat menyurat.
	Kegiatan: Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Beberapa fasilitas kerja belum memadai dan memerlukan pembaruan. Kendaraan operasional dan peralatan lapangan perlu perawatan rutin.	Melaksanakan pengadaan peralatan kantor dan kendaraan operasional sesuai kebutuhan prioritas.
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan nonperizinan kepada kecamatan. Hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan. Perlunya penerapan inovasi pelayanan berbasis digital.	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi sederhana (digitalisasi surat menyurat, sistem antrean, dsb).
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kebutuhan peningkatan kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat.	Melaksanakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan nilai-nilai Pancasila secara periodik dan kolaboratif.

		Kondisi sosial masyarakat yang heterogen perlu pembinaan rutin.	Penguatan koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas wilayah.
		Diperlukan sinergi Forkopimcam, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam pembinaan sosial kebangsaan.	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan tata kelola dan keuangan desa.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
		Diperlukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa.	Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui koordinasi dan pendampingan.
		Adanya dinamika dalam penyelenggaraan Pilkades dan pengelolaan aset desa.	Penguatan pembangunan partisipatif berbasis desa.
	Kegiatan: Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa	Masih ditemukan ketidaksinkronan antara usulan desa dan prioritas daerah.	Menyelenggarakan forum koordinasi perencanaan pembangunan desa-daerah secara berkala.
	Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Adanya potensi gangguan sosial dan keamanan di wilayah tertentu.	Penguatan koordinasi dengan aparat keamanan dan desa dalam kegiatan ketenteraman dan ketertiban.
	Kegiatan: Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dinamika sosial politik desa perlu pembinaan intensif.	Meningkatkan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan Pilkades secara netral dan transparan.

Berdasarkan analisis di atas, rumusan program dan kegiatan Kecamatan Petanahan Tahun 2026, secara umum disusun dengan mempertimbangkan:

1. Kesesuaian terhadap arah kebijakan nasional dan daerah (RPJPN, RPJMN, RPJMD Kebumen 2025–2029).
2. Hasil evaluasi kinerja tahun 2024 yang menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas.
3. Kebutuhan penguatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pembinaan masyarakat dan desa.
4. Optimalisasi penggunaan sumber daya, sarana prasarana, dan inovasi pelayanan berbasis teknologi sederhana.

3.3.2 Uraian Program dan Kegiatan

Rencana kerja Kecamatan Petanahan tahun 2026 mencakup 4 Program yang terdiri dari 9 Kegiatan dan 29 Sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pengujian /Veifikasi Keuangan OPD.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Bahan/Material
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana Prasarana Bangunan dan Gedung kantor Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk tahun anggaran 2026 Rp. 2.598.998.065,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Anggaran Tahun 2026

Program	Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.350.463.100	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.600.000	DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.004.000	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.930.965	DAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.000.000	DAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000	DAU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.500.000	DAU
TOTAL		2.730.498.065	

Rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Petanahan tahun 2026 sesuai dengan rancangan awal RKPD, tetapi ada dua sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu indikatif, karena ada penyesuaian. Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Petanahan Tahun 2025 adalah 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 29 (dua puluh embilan) Sub Kegiatan. Adapun masing-masing Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Ada 2 Sub Kegiatan yaitu;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan sejumlah 2 Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Umum sejumlah 7 Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 2 sub kegiatan:
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah 3 Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah 4 Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Ada (satu) kegiatan
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan,
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Ada 1 (satu) Kegiatan
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 7 sub kegiatan diantaranya;
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Petanahan memiliki karakteristik penyebaran yang beragam, bergantung pada sasaran, jenis urusan pemerintahan, dan lokasi pelaksanaannya.

1. **Program dan Kegiatan yang Tersebar ke Berbagai Kawasan**

Kegiatan dengan sifat tersebar umumnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan umum, pembinaan desa, serta kegiatan yang mendukung koordinasi lintas wilayah desa. Program-program tersebut diarahkan untuk menjangkau seluruh 21 desa di wilayah Kecamatan Petanahan secara merata, agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan maupun pembangunan antarwilayah.

Kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, melalui subkegiatan *Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* yang dilaksanakan di seluruh desa. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan berbagai subkegiatan seperti *Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*, *Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*, dan *Koordinasi Pendampingan Desa*. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan di setiap desa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kapasitas aparatur, dan mempercepat pencapaian status Desa Mandiri.
- Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pelayanan Publik, khususnya kegiatan *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*, juga memiliki sifat penyebaran karena pelayanan nonperizinan dan pelayanan administrasi publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah.

Kegiatan yang tersebar ini mencerminkan komitmen Kecamatan Petanahan terhadap asas pemerataan pembangunan dan pelayanan publik, dengan tujuan agar seluruh wilayah memperoleh akses yang sama terhadap layanan pemerintahan dan pembinaan.

2. **Program dan Kegiatan yang Terfokus pada Kawasan atau Kelompok Masyarakat Tertentu**

Sebagian kegiatan bersifat terfokus pada lokasi tertentu (khususnya kantor kecamatan) atau kelompok sasaran tertentu seperti aparatur pemerintah dan masyarakat penerima layanan. Fokus kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta efisiensi pengelolaan sumber daya.

Kegiatan yang termasuk kategori ini antara lain:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi kegiatan *Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*, *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*, serta *Administrasi Umum Perangkat Daerah*. Seluruh subkegiatan seperti penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan bahan logistik, penyediaan jasa komunikasi dan listrik, serta pemeliharaan gedung kantor difokuskan pada lokasi kantor Kecamatan Petanahan sebagai pusat administrasi dan pelayanan.
- Subkegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, seperti pengadaan mebel, peralatan, mesin, serta sarana prasarana gedung kantor, juga bersifat terfokus pada lingkungan kantor kecamatan. Tujuannya adalah meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, terutama pada ruang pelayanan PATEN.
- Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Nonperizinan dan Pelayanan Publik, berpusat di unit pelayanan kecamatan dengan sasaran langsung masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya.
- Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, yang bersifat terfokus pada desa tertentu yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa, tidak dilaksanakan di seluruh desa setiap tahun.

Dengan demikian, kegiatan yang terfokus ini lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas internal penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kapasitas aparatur, dan menyediakan sarana pendukung layanan publik yang efektif.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PETANAHAN

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen 2025-2029, yaitu *“Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya”* ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Kebumen ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (satu) yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi.”*.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Prioritas pendanaan di Kecamatan Petanahan Tahun 2026 memperhatikan Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2025-2029, Capaian RKPD Tahun 2024 dan mengakomodir beberapa isu strategis yang dapat dicapai. Rencana kerja dan kegiatan prioritas Kecamatan Petanahan mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Ket.
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.598.998.065	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.350.463.100	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.600.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.004.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.930.965	

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Ket.
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.500.000	
		2.730.498.065	

4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kecamatan Petanahan Tahun 2026 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, sebagai berikut

TABEL 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENST RA	TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PETANAHAN						2.730.498.065,00							2.809.071.727,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.730.498.065,00							2.809.071.727,00	
	7,01	KECAMATAN						2.730.498.065,00							2.809.071.727,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.598.998.065,00						-	2.669.071.727,00	
		[Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah]	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	66,95	68,78	70,03	2.598.998.065,00	-	-	-	-	-	-	2.669.071.727,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	11 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		5.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4.000.000	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		4.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	2.350.463.100			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	2.451.682.095,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.339.463.100	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		2.439.394.922,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		12.287.173,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	44.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	47.789.632,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		2.789.632,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	13.500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		14.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		7.600.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		3.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06 .0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	13.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		13.700.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		5.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		1.700.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah	-			4 unit	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	65.500.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	-	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		15.500.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		20.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		30.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 bulan	85.004.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	34.100.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		600.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	27.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		27.500.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	57.504.000	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		6.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah</i>	-			4 unit	59.930.965,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	61.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAH
	7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		41.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAH
	7.01.01.2.09 .0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				2 Unit	1.500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		2.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAH
	7.01.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	2.500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		3.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dir ehabilitasi				2 Unit	15.930.965,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		15.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						11.000.000,00						-	12.000.000,00	
		[Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat]	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100	95,05	100	100	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-			100 %	11.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	12.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN

	7.01.02.2.04 .0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				9 Laporan	11.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		12.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.02.2.04 .0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan	-	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		-	KECAMATAN PETANAHAN
3	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						20.000.000,00						-	21.000.000,00	
		[Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan]	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100	100	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggara an urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	-			100 persen	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	21.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN

	7.01.05.2.01 .0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				55 Orang	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	55 Orang	21.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						100.500.000,00						-	107.000.000,00	
		[Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan]	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100	100	100	100	100.500.000,00	-	-	-	-	-	-	107.000.000,00	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	-			100 %	100.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	-	107.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN

	7.01.06.2.01 .0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.06.2.01 .0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan	1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.06.2.01 .0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		21.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.06.2.01 .0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		21.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.06.2.01 .0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	6.500.000,00	Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Peningka tan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan Petanahan		7.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	J U M L A H							2.730.498.065,00							2.809.071.727,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petanahan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Petanahan sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Petanahan serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Ketersediaan anggaran yang terbatas menuntut pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efisien, efektif, dan berprioritas tinggi, dengan memfokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
2. Koordinasi lintas bidang dan lintas sektor harus terus diperkuat agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sinergis.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi serta sebagai dasar perbaikan kebijakan pada periode berikutnya.
4. Peningkatan kapasitas aparatur dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Renja-PD telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Penyusunan Renja 2026 didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Adapun rencana tindak lanjut dari pelaksanaan Renja Tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar program dan kegiatan lebih tepat sasaran.
2. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam tata kelola keuangan, perencanaan, dan pelayanan masyarakat.
5. Melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan perangkat daerah terkait untuk memastikan dukungan anggaran dan kebijakan terhadap kegiatan prioritas kecamatan.

Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2026 ini digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Perubahan Anggaran (DPA) Tahun 2026.

Dengan komitmen seluruh aparatur dan dukungan masyarakat, pelaksanaan Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2026 diharapkan dapat berjalan dengan baik, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Petanahan.

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Agus Setyawan	
Calyo Purnomo	



30 Juli 2025
KAMAT PETANAHAN

ARIS YUNANTO, S.IP. M.Si
Pembina Tingkat I/IV.b

NIP : 19690927 198911 1 001

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KECAMATAN
PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Kecamatan Petanahan telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi yang disampaikan oleh Dnas Terkait
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Petanahan terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Petanahan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 Nopember 2024

Jam : 08.00 WIB sd selesai

Tempat : Aula Kecamatan Petanahan

Musrenbang RKPD di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

MENYEPAKATI

- KESATU** : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang RKPD di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen
- KEDUA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen
- KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Petanahan, 21 Nopember 2024
 Pimpinan Sidang
 Camat Petanahan

ANGGA ADLIA PRIMANDA, S.STP., M.Si
 Pembina, IV/a
 NIP.19840426 200312 1 001

Menyetujui,

Wakil Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1	Y. AHIPUDIN	DPRD	DPRD	1
2	Jugjanzin	Unsur Perangkat Daerah	Bappeta Kbm	2
3	Arpa Mu	Unsur Kecamatan	Kecamatan	3
4	Bepi Darwingsih, S.Sos	Unsur Lembaga	PKK Kec	4
5	IAKLAM	Unsur Masyarakat/LMS	BPD	5

DELEGASI KECAMATAN PETANAHAN PADA FORUM PD, MUSRENBANG RKPD
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Subagyo	Pendes	Kewangunan	
2.	Dariman	BPD	Karangrejo	
3.	Muhammad	Pendes	Jogomertan	

Form 1

Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2026

sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2026

yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah

Kecamatan Petanahan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Desa/Kelurahan	SKPD Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6 Nupember 2024	Marsum	Kepala Desa	Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Bantuan bibit benih dan saprotan 1 paket Rp. 30.000.000	Masih diperlukan bibit dan saprotan untuk masyarakat	Desa Karangreja	Karangreja	Distapang
2	6 Nopember 2024	Marsum	Kepala Desa	Progran Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan Cultivator 1 unit Rp 21.000.000	Masihiperlukannya cultivator	Kel. Tani	Karangreja	Distapang
3	6 Nopember 2024	Marsum	Kepala Desa	Pengembangan dan pengelolaan Drainase	Pembangunan Drainase 1000 M Rp. 400.000.000	Masih diperlukannya saluran drainase	Dagan Balung RT 01 Rw 04 RT 05 RW	Karangreja	Dinas PUPR
4	6 Nopember 2024	Marsum	Kepala Desa	Pembangunan dan pengelolaan saluran drainase	Pembangunan Drainase 1000 Rp 250.000.000	Masih diperlukannya saluran drainase	Jalan Diponegoro Balung	Karangreja	Dinas PUPR
5	6 Nopember 2024	Marsum	Kepala Desa	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kota	Pembangunan Jembatan 1 unit Rp. 25.000.000	Jembatan kondisi rusak	Jembatan Kluthuk	Karangreja	Dinas PUPR
6	6 Nopember 2024	Marsum	Kepala Desa	Pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1 paket fasilitasi sebesar Rp. 10.659.000	Masih diperlukannya pembinaan bagi kel perempuan untuk penambah penghasilan	Desa Karangreja	Karangreja	Dinas Sosial Pemberdayaan
7	6 November 2024	Sakimin	Kepala Desa	karanggadung	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Gapoktan masih kekurangan alsintan	Gapoktan Sumber Makmur	karanggadung	DISTAPANG
8	6 November 2024	Sakimin	Kepala Desa	karanggadung	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Gapoktan Masih banyak lahan kosong	Gapoktan Sumber Makmur	karanggadung	DISTAPANG
9	6 November 2024	Sakimin	Kepala Desa	karanggadung	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	KKT Karya Rejeki masih kekurangan sapi	KKT Karya Rejeki	karanggadung	DISTAPANG
10	6 November 2024	Sakimin	Kepala Desa	karanggadung	Pembangunan Prasarana Pertanian	Belum adaya gedung pertemuan Kelompok TaninKharya Bhakti	Kelompok Tani Karya Bhakti	karanggadung	DISTAPANG
11	6 November 2024	Sakimin	Kepala Desa	karanggadung	Pengelolaan dan pengembangan sisten drainase	Sering terjadinya banjir	Desa	karanggadung	Dinas Pekerjaan
12	6 November 2024	Sakimin	Kepala Desa	karanggadung	Kegiatan Pembangunan Jalan	Jalan sepanjang 1 km sudah banyak yang rusak	Desa	karanggadung	Dinas Pekerjaan
13	6 November 2024	Supriyanto	Kepala Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan	4 unit cermin tikungan @Rp. 4.000.000x4= Rp. 16.000.000	Lokasi perlintasan jalan sering terjadi kecelakaan	RT 01/02 RT 02/02 RT 03/02 RT 01/03	Tegalretno	Disperkimhub
14	6 Npember 2024	Supriyanto	Kepala Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan	5 unit 1 PJU solar cell @ Rp 33.000.000,-x 5 = Rp 165.000.000,-	Kondisi jalan pada malam hari terang dan sering terjadi kecelakaan	RT 01/04 RT 03/02 RT 02/04 RT 01/02	Tegalretno	Disperkimhub
15	6 November 2024	Supriyanto	Kepala Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa	Pelatihan administrasi BUMDesa Sumber Makmur selama 2 hari dengan jumlah peserta 7 orang Rp. 18.000.000,-	Administrasi BUMDesa Sumber Makmur belum tertata rapi	Bumdes Sumber Makmur RT 02/02	Tegalretno	Dinas PMD
16	6 November 2024	Supriyanto	Kepala Desa	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Sosialisasi Bencana untuk Kelompok rentan selama 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang Rp. 1.500.000	Sejumlah 30 orang Kelompok Rentan belum paham terhadap resiko bencana	Desa Tegalretno	Tegalretno	Dinsos P3A

17	6 November 2024	Supriyanto	Kepala Desa	Pembangunan prasarana pertanian	2 unit Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 1 Blok 2 meter @ 200.000.000 x 2 unit = Rp. 400.000.000	Masih adanya akses jalan usaha tani yang kurang layak dan kondusif	Kecamatan Pajene	Kecamatan Pajene	Ditapang
18	6 November 2024	Supriyanto	Kepala Desa	Pembangunan prasarana pertanian	1 unit pembangunan sistem irigasi modern hidrokultur ukuran 22x6 meter sebagai pendukung usaha desa @ Rp. 500.000.000	Masih perlunya dukungan prasarana usaha desa	Kecamatan Pajene	Kecamatan Pajene	Ditapang
19	6 Nopember 2024	Umi Maskhanan	Kepala Desa	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pembinaan bagi Perangkat Desa, warga peduli aids, Posyandu, KP, SPAM, dan LPMD sejumlah 50 orang Rp. 7.153.000	Masih diperlukannya pembinaan bagi kelembagaan masyarakat desa ampelsari	Desa Ampelsari	Ampelsari	Dinas PMD
20	6 Nopember 2024	Umi Maskhanan	Kepala Desa	Facilitasi Bulan bakti GR Masyarakat	Facilitasi 1 Paket Rp. 50.626.000	Masih diperlukannya fasilitasi untuk persiapan pelaksanaan BBGRM	Desa Ampelsari	Ampelsari	Dinas PMD
21	6 Nopember 2024	Umi Maskhanan	Kepala Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Paket Rp. 50.813.000	Masih diperlukannya fasilitasi tentang pengelolaan aset desa	Desa Ampelsari	Ampelsari	Dinas PMD
22	6 Nopember 2024	Umi Maskhanan	Kepala Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Bimtek Profil Desa, IDM dan Desa online 1 paket Rp. 95.000.000	Masih diperlukannya bimtek tentang penyusunan Profil Desa, Pemutakhiran IDM	Desa Ampelsari	Ampelsari	Dinas PMD
23	6 Nopember 2024	Umi Maskhanan	Kepala Desa	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pejalatihan bagi penyelenggara jasa konstruksi sebanyak 5 lembaga Rp. 50.000.000	Masih perlu peningkatan kapasitas bagi penyelenggara jasa konstruksi	Desa Ampelsari	Ampelsari	Dinas PUPR
24	6 Nopember 2024	Umi Maskhanan	Kepala Desa	Kegiatan penyediaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Cermin Tikungan 10 unit Rp. 40.000.000	Masih diperlukan cermin di tikungan jalan untuk keamanan berkendara	Desa Ampelsari	Ampelsari	Dinas PUPR
25	6 November 2024	Nasiali	Kepala Desa	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	Kurangnya Produktivitas Ekonomi Perempuan	Desa Munggu	Munggu	DINAS SOSIAL
26	6 November 2024	Nasiali	Kepala Desa	Pemberdayaan len baga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Masih Kurangnya Pemahaman Tumpoksi kelambagan Desa	Desa Munggu	Munggu	DINAS PMU
27	6 November 2024	Nasiali	Kepala Desa	Penyeenggaraan Jalan	Penyeenggaraan Jalan di Kabupaten Kota	Kwalitas Jalan yang Masih Kurang	Desa Munggu	Munggu	DINAS PEKERJAAN
28	6 November 2024	Nasiali	Kepala Desa	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kwalitas JHT yang Masih Kurang	Desa Munggu	Munggu	DINAS PERTANIAN
29	6 November 2024	Nasiali	Kepala Desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Belum terdapat Pembangunan Gedung PKD	Desa Munggu	Munggu	DINAS KESEHATAN
30	6 November 2024	Nasiali	Kepala Desa	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Masih Terdapat Rumah yang Masuk Dalam Katagori Rumah Tidak Layak Huni	Desa Munggu	Munggu	DINAS PERUMAHAN
31	1 Oktober 2024	Subagyo	Kepala Desa	Kewangunan	Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder	Saluran irigasi sepanjang 1.500 meter di Blok Babah Tengah tidak berfungsi	Blok Babah Kewangunan	Kewangunan	DPUPR
32	1 Oktober 2024	Subagyo	Kepala Desa	Kewangunan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Pertanian sepanjang 200 meter Blok Kowar masih berupa tanah dan susah dilalui	Blok Kowar Kewangunan	Kewangunan	Ditapang
33	1 Oktober 2024	Subagyo	Kepala Desa	Kewangunan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jaringan irigasi sepanjang 1.200 meter di Blok Babah Kulon kurang berfungsi maksimal	Blok Babah Kulon Kewangunan	Kewangunan	Ditapang
34	1 Oktober 2024	Subagyo	Kepala Desa	Kewangunan	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Persimpangan jalan kabupaten dengan jalan Desa sering terjadi kecelakaan	Kewangunan	Kewangunan	Disperkumhub
35	1 Oktober 2024	Subagyo	Kepala Desa	Kewangunan	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Beberapa titik persimpangan Jalan kurang penerangan ketika malam hari sehingga rawan	Kewangunan	Kewangunan	Disperkumhub
36	1 Oktober 2024	Subagyo	Kepala Desa	Kewangunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Petani kekurangan tenaga kerja sehingga membutuhkan asintan sebagai alat bantu	Kewangunan	Kewangunan	Ditapang
37	6 November 2024	ALIF FATTA AL	Kepala Desa	Karangduwur	Relokasi Gedung PKD Desa	Lokasi yang sudah ada kurang strategis karena berdekatan dengan Puskesmas, sehingga perlu	DESA KARANGDUWUR	Karangduwur	
38	6 November 2024	ALIF FATTA AL	Kepala Desa	Karangduwur	Pembangunan Sarana Pertanian	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian di Desa Karangduwur	DESA KARANGDUWUR	Karangduwur	
39	6 November 2024	ALIF FATTA AL	Kepala Desa	Karangduwur	Pengaspalan Jalan Desa	Desa Karangduwur merupakan Desa yang luas dan juga banyaknya jalan Desa sehingga	DESA KARANGDUWUR	Karangduwur	
40	6 November 2024	ALIF FATTA AL	Kepala Desa	Karangduwur	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Masih minimnya penerangan jalan di Desa Karangduwur sehingga perlu adanya bantuan	DESA KARANGDUWUR	Karangduwur	

41	6 November 2024	ALIF FATHA AL	Kepala Desa	Karangduwur	APRS (Alat Pengalir Pupuk Organik) Pengaliran Traktor Roda 4 (Traktor Roda 4) Pemasangan Alat Pengalir Pupuk	Banyaknya limbah ternak dan pertanian yang belum dimanfaatkan dan mengingat kelangkaan	DESA KARANGDUWUR	Karangduwur	
42	6 November 2024	ALIF FATHA AL	Kepala Desa	Karangduwur	Pembangunan Saluran Peternakan	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian di Desa Karangduwur	DESA KARANGDUWUR	Karangduwur	
43	6 November 2024	Slamet Fauzan	Kepala Desa	DISTAPANG	Pembangunan talud penahan jalan	Jalan yang sudah dibangun rawan rusak karena belum ada talud penahan dan membahayakan	Jalan tembus Petanahan s.d	Petanahan	DPUPR
44	7 November 2024	Slamet Fauzan	Kepala Desa	DPUPR	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) dengan Solar Cell	Sepanjang jalan yang baru dibangun masih gelap dan rawan kecelakaan karena belum ada	Jalan tembus Petanahan s.d	Petanahan	DPUPR
45	8 November 2024	Slamet Fauzan	Kepala Desa	DPUPR	Pemasangan Rambu rambu Lalulintas	Terdapat beberapa titik jalan yang ramai dan rawan kecelakaan karena kurangnya rambu	Perempatan Pasar Petanahan - Simpang	Petanahan	DPUPR
46	9 November 2024	Slamet Fauzan	Kepala Desa	DISTAPANG	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi	Saluran irigasi yang ada terjadi pendangkalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya	Saluran gendong sawah utara	Petanahan	DISTAPANG
47	10 November 2024	Slamet Fauzan	Kepala Desa	DISTAPANG	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan usaha tani yang ada tidak nyaman dilalui petani karena masih berupa tanah yang labil	Sawah utara	Petanahan	DISTAPANG
48	11 November 2024	Slamet Fauzan	Kepala Desa	PERKIMH	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman	Masih terdapat rumah warga yang tidak layak huni	5 dusun	Petanahan	DINAS PERKIMH
49	6 November 2024	Hojali	Kepala Desa	Pembangunan saluran drainase pembuangan air limbah rumah tangga tingkat desa dari RT 01 s.d RT 09 dan	Tersedianya Saluran Drainase untuk Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga di tingkat desa	adanya air limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan	RT 01 s.d RT 09	Kebonsari	Dinas Pekerjaan
50	6 November 2024	Hojali	Kepala Desa	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota	Pemeliharaan jalan yang menaungi kewenangan kabupaten/kota	rusaknya jalan K1 dari pertigaan pasar Krtig sampai dengan Petanahan	Jalan K1 dan Krtig Petanahan	Kebonsari	Dinas Pekerjaan
51	6 November 2024	Hojali	Kepala Desa	Penghijauan/Peternakan Lingkungan Hidup	Terjaganya kelestarian lingkungan di wilayah Desa Kebonsari dengan penanaman 1000 Pohon Alpukat	adanya kelangkaan pohon buah alpukat yang sangat bermanfaat	Desa Kebonsari	Kebonsari	Dinas Lingkungan
52	6 November 2024	Hojali	Kepala Desa	Pengelolaan & Pengembangan Drainase	Terbangunya parapet (tanggul) sungai	adanya ranas sawah milik yg rusak produksi dan pekarangan yang tergenang air pada saat hujan	Dukuh Nungsa	Kebonsari	Dinas Pekerjaan
53	6 November 2024	Hojali	Kepala Desa	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/kota	Terbangunya rumah layak huni bagi warga kurang mampu	masih ada rumah tidak layak huni	Desa Kebonsari	Kebonsari	Dinas Perumahan
54	6 November 2024	Hojali	Kepala Desa	Penyediaan perlengkapan jalan kabupaten	Tersedianya Cermin tikungan & LPJU Solar Cell	adanya kecelakaan di jalan desa pada beberapa tikungan	Desa Kebonsari	Kebonsari	Dinas Perumahan
55	6 November 2024	Khoeri Anwar	Kepala Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase	Pemeliharaan/Rehab Saluran Drainase sepanjang 650 m	Saluran drainase dangkal dan longsor	Sungai Kathing	Grogopenatus	Dinas Pekerjaan
56	6 November 2024	Khoeri Anwar	Kepala Desa	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan Traktor roda dua 6 SPK sebanyak 2 unit	Kurangnya alat untuk pengolahan lahan	Gapokan	Grogopenatus	Dinas Pertanian dan
57	6 November 2024	Khoeri Anwar	Kepala Desa	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 600 meter	Jalan usaha tani tidak nyaman dilalui petani	JUT Sibaya - Tembelang	Grogopenatus	Dinas Pertanian dan
58	6 November 2024	Khoeri Anwar	Kepala Desa	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi Saluran Irigasi sepanjang 450 meter	Saluran irigasi dangkal, tidak berfungsi	JITUT Jurutengah-Simangau	Grogopenatus	Dinas Pertanian dan
59	6 November 2024	Khoeri Anwar	Kepala Desa	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan Kambing Betina sebanyak 20 ekor	KWTT baru terbentuk, kegiatan beternak kambing	KWTT	Grogopenatus	Dinas Pertanian dan
60	6 November 2024	Khoeri Anwar	Kepala Desa	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan Ternak Sapi PO Betina sebanyak 10 ekor	KTT Bibit makmur masih kekurangan sapi	Kel Ternak	Grogopenatus	Dinas Pertanian dan
61	6 November 2024	Siti Rohayah	Kepala Desa	Program penyediaan sarpras pertanian	Terbangunya Jalan Usaha Tani	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Blok Gekeng Blok Sipring	Grogobeningsari	Distapang
62	6 November 2024	Siti Rohayah	Kepala Desa	Program pengelolaan dan pengembangan sarana drainase	Terbangunya Drainase Pembuangan air lingkungan	Pembangunan Jaringan Sistem Irigasi Drainase Lingkungan	RT 002 RW 002	Grogobeningsari	PUPR
63	6 November 2024	Siti Rohayah	Kepala Desa	Program Pembangunan Jalan Desa	Terbangunnya Jalan Menuju Syeh Anom Sidakansa yang setandar	Pembangunan Jaringan Sistem Irigasi Drainase Lingkungan	Jalan Menuju Makom RW 003	Grogobeningsari	PUPR
64	6 November 2024	Siti Rohayah	Kepala Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan sarana drainase	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Sistem Irigasi Drainase Lingkungan	Desa Grogobeningsari	Grogobeningsari	PUPR

65	6 November 2024	Ida Rohayati	Kapala Desa	Program Persewaan dan Pemukiman Kawasan Kumuh	Pertanian Rumah Tidak Layak huni untuk perumahan	Masih ada rumah tidak layak huni	Desa Gugubernggan	Gugubernggan	Desa Hub
66	6 November 2024	Ida Rohayati	Kapala Desa	Pengembangan Kawasan Bersihwa Keresmpa Rantan	Sawahsah Bersihwa untuk Keresmpa Rantan	Pengembangan Kawasan Bersihwa Keresmpa Rantan	Desa Gugubernggan	Gugubernggan	Desa Hub
67	6 November 2024	Muhammad Ratrio Utami	Kapala Desa	Program Peningkatan Kapasitas Pemertihan Desa	Untuk meningkatkan kualitas Pemertihan Desa Lembaga Desa dan BPD	Untuk meningkatkan kualitas Pemertihan Desa Lembaga Desa dan BPD	Jogomertan	Jogomertan	PMO
68	6 November 2024	Muhammad Ratrio Utami	Kapala Desa	KUMHAPITUR	Penggunaan Rumah Tidak Layak Huni	Masih ada rumah tidak layak huni	Jogomertan	Jogomertan	DM205
69	6 November 2024	Muhammad Ratrio Utami	Kapala Desa	Program Peningkatan Hasil Pertanian	Pengadaan Alat Pertanian Cultivator (Traktor kecil) Atau Traktor Roda 4	Tersedianya alat pertanian guna mempercepat panen dalam bercocok tanam	Jogomertan	Jogomertan	UNSTAFANO
70	6 November 2024	Muhammad Ratrio Utami	Kapala Desa	Program Peningkatan Bersihwa Sungai	Pembangunan/penggiatan Drainase/Saluran Pembuangan Air	Pembangunan/penggiatan yang sangat berpengaruh besar seperti bendungan pada Rte 1 dan Rte 2	Jogomertan	Jogomertan	OPUPR
71	6 November 2024	Muhammad Ratrio Utami	Kapala Desa	Program Pengawasan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengawasan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah	Mempertahankan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar berkembangnya wisata Desa dan budaya lokal yang mendukung perekonomian	Jogomertan	Jogomertan	OPUPR
72	6 November 2024	Muhammad Ratrio Utami	Kapala Desa	Program Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Tertertugunya Sarana Prasarana Pengembangan Pariwisata dan Budaya	Mempertahankan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar berkembangnya wisata Desa dan budaya lokal yang mendukung perekonomian	Jogomertan	Jogomertan	DMAS PARAWISATA
73	6 November 2024	Cheerudin	Kapala Desa	Program penyediaan sarana pertanian	Tersedianya kleming betina dan jantan 20 ekor Rp 100.000.000	Kleming betina dan jantan 20 ekor Rp 100.000.000	Desa Tanjungan	Tanjungan	Delapang
74	6 November 2024	Cheerudin	Kapala Desa	Pembangunan Sarana Pertanian	Pembangunan Jembatan Ingas Tingkat Usaha Tani 1 unit Rp 200.000.000	Jatut tidak bisa berfungsi secara optimal	Desa Tanjungan	Tanjungan	Delapang
75	6 November 2024	Cheerudin	Kapala Desa	Pembangunan Sarana Pertanian	Tertertugunya Jalan Usaha Tani 1 Paket Rp 200.000.000	Jalan usaha tani tidak nyaman dilalui para petani	Desa Tanjungan	Tanjungan	Delapang
76	6 November 2024	Cheerudin	Kapala Desa	Pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Tersedianya skroter pompa air 3 inci 1 unit Rp 75.000.000	Masih dibutuhkannya pompa air 3 inci 3 unit	Desa Tanjungan	Tanjungan	Delapang
77									
78	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	1) Pembangunan Lumbung/Gudang Cederang Penger Mesurakal 2) Pembangunan Lumbur Jemur	Penyediaan infrastruktur pendukung Kemandirian Penger Lumbur	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
80	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Penyediaan sarana prasarana dan pascapanen meliputi traktor roda dua, pompa air, cultivator, kendeng, KPPG, kendeng, Keresmpa dan Pemertihan Jembatan Ingas Usaha Tani	Penggunaan Sarana Pembukung Pertanian Sesuai dengan Keresmpa, Teknologi dan Keresmpa dan Pemertihan Jembatan Ingas Usaha Tani	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
81	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase Lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
82	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
83	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
84	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
85	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
86	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
87	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
88	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
89	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
90	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
91	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
92	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
93	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
94	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
95	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
96	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
97	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
98	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
99	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan
100	6 November 2024	Sucipto	Kapala Desa	Desas Pertanian dan Peningkat Kati. Katurunan	Pembangunan Drainase lingkungan / Pembangunan Perir. A2 1 paket 100.000.000 Rp 80.000.000	Penggunaan dan Pengembangan sistem Drainase	Desa Sedomulyi	Sedomulyi	Desa Pertanian dan

90	6 November 2024	Sucipto	Kepala Desa	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial Dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan	Kelompok perempuan kurang tidak optimal dalam pengembangan usaha untuk peningkatan	Desa Grujagan	Desa Grujagan	Dinas Sosial
91	6 November 2024	Agus	Kepala Desa	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	RTLH 22 Unit @ Rp 20 000 000	Masih Ada Perumahan yang kurang layak huni			
92	6 November 2024	Agus	Kepala Desa	Penyediaan Perlengkapan Jalan kabupaten	LPJU Solar Cell 6 Unit @ Rp 31 000 000	Kondisi Lingkungan masih gelap	Desa Kritig	Desa Kritig	Dinas Perkimhub
93	6 November 2024	Agus	Kepala Desa	Mesin Pertanian	Traktor 1 Unit, Tank Semprot 20 Unit	Kurangnya mesin Pertanian Traktor	Desa Kritig	Desa Kritig	Dinas Perkimhub
94	6 November 2024	Agus	Kepala Desa	Pengadaan Sapi PO Betina	Bibit Ternak Sapi PO 4 Ekor @ Rp 22 500 000	Kurangnya populasi sapi PO	Kelompok Tani Murakabi	Desa Kritig	Distapang
95	6 November 2024	Agus	Kepala Desa	Pembangunan Jaringan irigasi Tersier	Saluran Irigasi Tersier 600 Meter	Saluran Irigasi masih tanah	Kelompok Temak Sido Makmur	Desa Kritig	Distapang
96	6 November 2024	Agus	Kepala Desa	Peningkatan Jalan Desa/Kecamatan/Kabupaten	Pembangunan Jalan antar Desa 600 Meter	Kondisi jalan rusak dan berlubang	Desa Kritig	Desa Kritig	Dinas DPUPR
97	6 Nopember 2024	Rokhmal	Kepala Desa	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1 paket fasilitasi peningkatan produktifitas ekonomi perempuan Rp 10 659 000	Masih perlunya peningkatan ekonomi kaum perempuan untuk menambah penghasilan	Desa Nampudadi	Nampudadi	Dinas Pemberdayaan
98	6 Nopember 2024	Rokhmal	Kepala Desa	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Pembinaan Kelembagaan TP PKK 33 orang Rp 12 000 000	Masih perlunya pembinaan TP PKK Desa	Desa Nampudadi	Nampudadi	Dinas Pemberdayaan
99	6 Nopember 2024	Rokhmal	Kepala Desa	Program penyelenggaraan LLAJ	Cermin tikungan 6 unit Rp 24 000 000	Perlu cermin di tikungan jalan untuk keamanan berkendara	Desa Nampudadi	Nampudadi	Disperkimhub
100	6 Nopember 2024	Rokhmal	Kepala Desa	Pengembangan Usaha Mikro	Pelatihan Kerajinan anyaman bambu 70 orang Rp 15 000 000	Masih perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat untuk membuat kerajinan dari bahan	Desa Nampudadi	Nampudadi	Dinas Perindustrian
101	6 Nopember 2024	Rokhmal	Kepala Desa	Pemberdayaan Usaha UMKM	Pelatihan Pengolahan Jahe Instan dan Peralatan 1 Paket Rp 50 000 000	Hasil budidaya jahe yang belum bisa diolah karena minimnya peralatan dan ketrampilan	Desa Nampudadi	Nampudadi	Dinas Perindustrian
102	6 Nopember 2024	Rokhmal	Kepala Desa	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pembangunan JUT 1 paket Rp 200 000 000	Saluran irigasi yang tidak berfungsi maksimal	Blok Sikebo RT 2 RW 1 Desa	Nampudadi	Distapang
103	6 Nopember 2024	Sutowo	Kepala Desa	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan 700 m Rp 350 000 000	Kondisi Jalan rusak	RW 1 Ds Tresnorejo	Tresnorejo	Dinas PUPR
104	6 Nopember 2024	Sutowo	Kepala Desa	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten/Kota	Cermin Tikungan 7 unit Rp 70 000 000	Perlunya cermin di tikungan jalan untuk keamanan berkendara	Desa Tresnorejo	Tresnorejo	Dinas PUPR
105	6 Nopember 2024	Sutowo	Kepala Desa	Rehabilitasi Gedung PKD	Rehabilitasi Gedung PKD 1 unit Rp 50 000 000	Gedung PKD rusak	Desa Tresnorejo	Tresnorejo	Dinkes PPKB
106	6 Nopember 2024	Sutowo	Kepala Desa	Pengawasan Penggunaan Sarana pertanian	Pompa air 6 inci 3 unit Rp 76 500 000	Kurangnya alatiran	Desa Tresnorejo	Tresnorejo	Distapang
107	6 Nopember 2024	Sutowo	Kepala Desa	Pencegahan Perumahan dan kawasan kumuh pada daerah kabupaten/kota	Pembangunan RTLH Rp 100 000 000	Masih ada rumah yang tidak layak huni	Desa Tresnorejo	Tresnorejo	Disperkimhub
108	6 Nopember 2024	Sutowo	Kepala Desa	Kegiatan penyediaan Sarpras dan Utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Saptitank 5 paket Rp 45 000 000	Masih ada pemukiman yang perlu Saptitank	Desa Tresnorejo	Tresnorejo	Disperkimhub
109	6 November 2024	Siswati	Kepala Desa	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Pembangunan dan Pemeliharaan JITU	Irigasi belum maksimal	Desa Podourip	Podourip	Distapang
110	6 November 2024	Siswati	Kepala Desa	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan LPJU/ Solar Cell	Kondisi jalan pada malam hari gelap dan sering terjadi pencurian	Desa Podourip	Podourip	DPU PR
111	6 November 2024	Siswati	Kepala Desa	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Kumuh	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni	Desa Podourip	Podourip	Dinas Perumahan
112	6 November 2024	Siswati	Kepala Desa	Penyelenggaraan Pembangunan Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Podourip - Sugihwaras	Jalan K1 Podourip-Sugihwaras kondisinya rusak	Podourip RT 01 RW 01	Podourip	DPU PR
113	6 November 2024	Siswati	Kepala Desa	Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan Sarpras Produksi Pertanian/ Power Treaser	Kurangnya mesin pertanian	Gapoktan Sudimulyo	Podourip	Distapang

114	6 November 2024	Siswari	Kepala Desa	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Masih adanya jalan pertanian yang kurang layak dan rusak	Desa Podokurup	Podokurup	Ditapang
115	6 November 2024	Sabit Banani	Kepala Desa	Pembangunan Gudang Sampah / Bank Sampah / TPS-3R	Pembangunan Gudang Sampah / Bank Sampah / TPS-3R				
116	6 November 2024	Sabit Banani	Kepala Desa	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Terbangunnya Jalan Usaha Tani senilai 1 paket 200.000.000	Pengelolaan sampah di desa Jatimulyo sudah berjalan baik tetapi belum memiliki gudang bank Masih adanya RTU	Desa Jatimulyo Kecamatan	Desa Jatimulyo Kecamatan	Desa UHR
117	6 November 2024	Sabit Banani	Kepala Desa	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1 paket senilai 200.000.000	Masih adanya akses jalan pertanian yang kurang layak rusak dan berlumpur	Desa Jatimulyo Kecamatan	Desa Jatimulyo Kecamatan	Desa Perumahan
118	6 November 2024	Sabit Banani	Kepala Desa	Terperuhnya Alat Mesin pertanian Traktor Roda 2, Handsprayer	Terperuhnya Alat Mesin pertanian Traktor Roda dua 1 unit Handsprayer 20 unit	Masih adanya jaringan irigasi desa sebagai penunjang pokok pertanian dengan kondisi	Jatimulyo Di Sember RT 1 TLV 1	Desa Jatimulyo Kecamatan	Ditapang
120	6 November 2024	Sabit Banani	Kepala Desa	Terperuhnya Bibit dan Pengelolaan Kolam Ikan Bagi Pokdakan	Terperuhnya Bibit dan Pengelolaan Kolam Ikan Bagi Pokdakan	Area pertanian desa Jatimulyo yang luas dengan ketersediaan traktor yang kurang	Dukuh Jatani	Desa Jatimulyo Kecamatan	
121	6 November 2024	Muhlisin	Kepala Desa	Dinas PUPR	Pembangunan Talud Jalan	Potensi budidaya ikan yang memadai tetapi kelompok yang ada tidak mempunyai	Gapoktan Desa Jatimulyo Kecamatan	Desa Jatimulyo Kecamatan	
122	6 November 2024	Muhlisin	Kepala Desa	Dinas PUPR	Pembangunan Jalan antar Desa		Minatraya Desa		
123	6 November 2024	Muhlisin	Kepala Desa	DPKPLH	Kendaraan Roda 3 Sampah	Jalan antar desa longsor dan belum ada penahan bahu jalan	Desa Banjarwinangun arah	Banjarwinangun	Dinas PUPR
124	6 November 2024	Muhlisin	Kepala Desa	Dinas PUPR	Saluran Drainase Kali Bedogol	Jalan antar desa Rusak dan berlubang	Desa Banjarwinangun arah	Banjarwinangun	Dinas PUPR
125	6 November 2024	Muhlisin	Kepala Desa	Ditapang	Jalan Usaha Tani	Sampah di Desa belum ada pengangkut untuk kegiatan Bank Sampah	Desa Banjarwinangun	Banjarwinangun	DPKPLH
126	6 November 2024	Muhlisin	Kepala Desa	Ditapang	Saluran Irigasi Tersier	Saluran Drainase Kali Bedogol Menyempit dan banyak yang longsor	Desa Banjarwinangun	Banjarwinangun	Dinas PUPR
						Jalan Usaha Tani masih tanah dan becek dan sulit dilalui	Desa Banjarwinangun	Banjarwinangun	Ditapang
						Saluran Irigasi masih banyak yang tanah dan menyempit	Desa Banjarwinangun	Banjarwinangun	Ditapang

Cara Pengisian Tabel Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2026

Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan untuk tahun rencana

Kolom (2) diisi dengan tanggal usulan kegiatan

Kolom (3) diisi dengan nama pengusul kegiatan

Kolom (4) diisi dengan profil pengusul kegiatan

Kolom (5) diisi dengan uraian sesuai dengan usulan kegiatan

Kolom (6) diisi dengan uraian kegiatan yang diusulkan

Kolom (7) diisi dengan permasalahan yang dihadapi

Kolom (8) diisi dengan alamat eksisting lokasi yang diusulkan

Kolom (9) diisi dengan alamat desa

Kolom (10) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi



Form 2

Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2026

sebagai Usulan Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tahun 2026

yang akan diusulkan ke Perangkat Daerah

Kecamatan Petanahan

No	Tanggal Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Desa/Kelurahan	SKPD Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6 November 2024	Angga Aulia Premanda S	Pt Cemati	Pembangunan Gedung	Rehab Pembangunan Kantor Kecamatan	Mendukung pelayanan Publik Pelaksanaan Kinerja Aparat Kecamatan dan Mendukung	Jl Sokka No 13 Petanahan	Desa Petanahan	Dinas PUPR
2			Pt Cemati	Pembangunan Ruas Jalan	Jl. Syeh Abdul Awi	Meningkatkan pelayanan transportasi masyarakat memberikan dukungan	Petanahan Kebonsan-Kritig	Petanahan-Kebonsan-Kritig	Dinas PUPR
3			Pt Cemati	Pembangunan Ruas Jalan	Jl Karangduwur-Munggu-Karanggadung	Meningkatkan pelayanan transportasi masyarakat memberikan dukungan	Karangduwur Munggu-Karanggadung	Karangduwur Munggu-Karanggadung	Dinas PUPR
4	6 November 2024	Marsum	Kepala Desa	Pembangunan dan pengelolaan saluran drainase	Pembangunan Drainase 1000 Rp 250.000.000	Masih diperlukannya saluran drainase	Jalan Diponegoro Balung	Karangrejo	Dinas PUPR
5	6 November 2024	Sakimin	Kecils Desa	Karanggadung	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan perbatasan Karangrejo Tegaltretno (Pengerukan Sungai) Saluran induk antar Desa Volume 2 Km lebar 3m	Sering terjadinya banjir	Desa	Karanggadung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	6 November 2024	Umi Masikhani S.Pd. AUD	Kepala Desa	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa	Pembinaan bagi Perangkat Desa, warga peduli aids, Posyandu, KP SPAM, dan LPMO sejumlah 50 orang Rp 73.534.000	Masih diperlukannya pembinaan bagi kelembagaan masyarakat desa ampelsari	Desa Ampelsari	Ampelsari	Dinas PMD
7	6 November 2024	Siamot Fauzan	Kepala Desa	DISTAPANG	Pembangunan talud penahan jalan	Jalan yang sudah dibangun rawan rusak karena belum ada talud penahan dan	Jalan Tembus Petanahan s/d Japawira (Rt 05, Rw 02)	Petanahan	DPUK
							Talud (Rt 05, Rw 02) samping Rumah Bapak Mustoli, Pasar Unggas ke Selatan sampai dengan Kali Bama	Petanahan	DPUK
8	6 November 2024	Siti Rotayyah	Kepala Desa	Progran Pembangunan Jalan Desa	Terbangunnya Jalan Menuju Syeh Anom Sidakansa yang setandar	Terdapat Destinasi Wisata Religi (Makom Syeh Anom Sidakansa) sering dilaluinya Peziarah oleh karenanya Jalan sering rusak karena tidak sesuai dengan tonase	Jalan Menuju Makom RW 003	Grogolbenangari	PUPR
9	6 November 2024	Subwo	Kepala Desa	Penyeleenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan 700 m Rp. 350.000.000	Kondisi jalan rusak	RW 1 Ds. Tresnorojo	Tresnorojo	Dinas PUPR
10	6 November 2024	Muhlisn	Kepala Desa	Dinas PUPR	Pembangunan Jalan antar Desa	Jalan antar desa Rusak dan berlubang	Desa Banjarwinangun arah Triksno	Baranwinangun	Dinas PUPR



DOKUMENTASI MUSRENBANGCAM RKPd KABUPATEN KEBUMEN DI KECAMATAN PETANAHAN

